



Tidak Laporan, Dana RW Tak Dicairkan

Bersumber dari APBD, Harus Dipertanggungjawabkan

JOGJA – Rukun Warga (RW) di Kota Jogja yang tidak tertib dalam pelaporan keuangan dana stimulan tidak akan mendapatkan kembali pada tahun berikutnya. Pada tahun ini terdapat beberapa RW yang tidak kembali mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 10 juta karena tidak jelas laporan kegiatan tahun lalu.

"Ada RW yang tahun ini tidak dikeluarkan anggarannya karena laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya belum

beres," ujar Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jogja Octo Noor Arafat kemarin (27/5).

Sayangnya, Octo mengaku tidak hafal berapa rukun warga dari total 616 RW di Kota Jogja, yang tahun ini tidak memperoleh dana stimulan. Tahun ini merupakan yang terakhir dana stimulan RW dikelolanya, karena tahun depan beralih dikelola Bagian Tata Pemerintahan Kota Jogja. "Untuk itu bagi RW yang

belum merampungkan laporan keuangannya diminta segera menyelesaikan. Yang laporannya belum selesai tetap kami tagih," terangnya.

Sama dengan tahun sebelumnya, dana stimulan RW diberikan sebesar Rp 10 juta. Untuk penggunaannya, Octo mengatakan, sudah ada arahan dan larangan. Dia mencontohkan seperti untuk pembelian tenda atau kursi yang hampir setiap tahun ada yang mengusulkan.

"Makanya kami beri rambu-rambu, wong tahun lalu sudah beli kursi kok tahun ini dianggarkan lagi," ujarnya.

Octo mengatakan, tiap RW di

kampung sebenarnya diarahkan untuk saling berkoordinasi. Hal itu untuk menghindari pembelian barang yang sama. Justru, tambahnya, tiap RW diminta saling melengkapi, sehingga barang yang dibeli bisa dimanfaatkan semua.

"Dalam satu kampung kan ada beberapa RW, untuk pengembangan kampung harusnya tiap RW saling melengkapi," ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Agusnur mengatakan, setiap anggaran yang dikeluarkan dari APBD harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Karena itu, tiap RW yang belum

membuat laporan penggunaan anggaran dimintanya segera menyelesaikan.

"Tidak cukup hanya tidak diberikan lagi, tapi laporan tahun sebelumnya harus tetap ditagih," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pada dinas terkait untuk memberikan pelatihan pembuatan proposal dan laporan keuangan ke RW. Agus mensinyalir adanya RW yang belum laporan tersebut karena ketidaktahuan dalam format laporan. "Sejak dari penyusunan proposal harus didampingi supaya yang dibeli juga sesuai," sarannya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005